

MASYARAKAT ANTUSIAS AKSES MPP

Sistem dan Infrastruktur Bakal Dioptimalisasi

YOGYA (KR) - Tiga bulan usai dioperasikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) di kompleks Balai Kota Yogya disambut antusias masyarakat. Berbagai sarana infrastruktur maupun sistem pun bakal dioptimalisasi guna menjamin pelayanan publik melalui MPP semakin memudahkan masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogya Nurwidhiartana, menjelaskan MPP sebenarnya baru akan dioperasikan secara penuh pada tahun 2022 mendatang. "Kemarin 30 Juni 2021 masih soft launching, maknanya baru ada sekitar 22 jenis layanan. Namun kami mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui MPP," jelasnya, Selasa (31/8).

Pihaknya menargetkan MPP dapat dioperasikan secara penuh pada Mei 2022 mendatang. Untuk mendukungnya, sejumlah infrastruktur akan dibangun agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Infrastruktur tersebut antara lain fasilitas selasar untuk mendukung kapasitas ruangan yang ada di dalam.

Selasar itu akan dibuat mengitari gedung induk MPP. Fungsinya antara lain menjembatani layanan drive thru, parkir kendaraan bermotor, pejalan ka-

ki hingga layanan yang bisa dilakukan di luar. "Kami atur strategi. Misal untuk layanan pengambilan KTP elektronik, kantor pos atau fotokopi dokumen yang tidak mengharuskan masuk ke dalam bisa dilayani di luar. Sehingga perlu ada fasilitas selasar," tandasnya.

Begitu juga untuk layanan drive thru. Pengguna sepeda motor akan diberikan ruang di sisi selatan gedung. Sedangkan pengendara mobil melalui sisi timur gedung. Layanan drive thru itu kelak untuk layanan SIM, STNK dan KTP elektronik. Sementara terkait optimalisasi sistem salah satunya integrasi layanan pengurusan kehilangan identitas kependudukan.

Warga yang kehilangan KTP elektronik membutuhkan surat kehilangan dari kepolisian jika hendak mengurus KTP baru. Melalui integrasi sistem, maka masyarakat cukup mengakses satu layanan dan surat kehilangan serta KTP baru bisa langsung diperoleh.

"Surat kehilangan bisa diakses melalui MPP. Secara sistem petugas Dindukcapil akan memperoleh notifikasi kemudian memproses KTP tersebut. Sehingga warga cukup datang sekali ke MPP akan langsung mendapat surat kehilangan dan KTP baru," imbuhnya.

Kendati demikian, hal tersebut hanya pilihan bagi masyarakat. Jika ada yang tetap datang ke MPP untuk mengakses surat kehilangan di loket kepolisian, kemudian beralih ke loket KTP tetap akan dilayani seperti biasa. Hal ini, lanjut Nurwidhiartana, belum semua masyarakat mampu akrab dengan digitalisasi layanan. Sehingga masyarakat tetap diberikan pilihan yang memudahkan.

Sementara itu selama masa PPKM layanan publik di MPP Kota Yogya masih banyak didominasi oleh administrasi kependudukan, pajak dan perbankan. Pasalnya sejumlah layanan instansi vertikal masih membatasi sesuai kebijakan organisasinya. Di antaranya seperti kepolisian, imigrasi, maupun kementerian agama. "Tapi saat ini kepolisian sudah mengajukan izin ke Korlantas Polri agar layanan SIM bisa kembali dioperasikan di MPP Kota Yogya," katanya. **(Dhi)-f**

Tak Ada Denda Keterlambatan Pembayaran PKB

YOGYA (KR) - Selama pandemi Covid-19, tidak ada sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dispensasi tersebut diberlakukan hingga akhir Desember 2021. Meski demikian, masyarakat diimbau agar membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Pembayaran pajak secara tepat waktu sesungguhnya memudahkan masyarakat untuk mengalokasikan dana, sehingga tidak *kemrungsung* jika sudah sampai pada batas waktu pembayaran.

Demikian disampaikan Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda DIY AKP Maryanto SH, Selasa (31/8). Hal tersebut perlu disampaikan agar masyarakat tidak bingung dalam menyikapi situasi, terutama berkaitan dengan pandemi Covid-19, termasuk diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terkait hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa tidak ada sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Maryanto menjelaskan ditiadakannya sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor selaras dengan Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penghapusan Perubahan Keempat



AKP Maryanto SH

Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

"Perpanjangan mengenai pembebasan sanksi denda tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021," ujar Maryanto.

Mengenai animo masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, baik perpanjangan tahunan

dan lima tahunan selama pandemi Covid-19, Maryanto menjelaskan terjadi penurunan sekitar 7,5 persen dibanding sebelum masa pandemi Covid-19. Hal itu dianggap wajar karena selama pandemi Covid-19, baik pemerintah pusat maupun daerah mewajibkan semua pihak menaati protokol kesehatan (prokes) demi mencegah penyebaran virus Corona.

Maryanto menjelaskan, pihaknya tetap mengharuskan masyarakat yang datang ke Ditlantas Polda DIY menaati prokes, mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjauhi kerumunan. Demikian pula petugas yang melakukan pelayanan, juga wajib mematuhi prokes ketika melayani masyarakat. Jika ada petugas yang tidak menaati prokes, nantinya akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. **(Hrd)-f**

PPKM DI KOTA YOGYA BERPOTENSI TURUN LEVEL

Perkembangan Kasus Rendah, Warga Tak Boleh Abai

YOGYA (KR) - Dalam kurun waktu terakhir laju perkembangan kasus Covid-19 di Kota Yogya maupun DIY berangsur turun atau semakin rendah. Kendati demikian masyarakat diimbau tidak abai kendati kebijakan pembatasan mulai dilonggarkan.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan saat ini Kota Yogya serta wilayah aglomerasi DIY masih diputuskan menerapkan PPKM level 4 hingga 6 September mendatang. "Kecenderungan kasus saat ini kan sudah menurun. Ada potensi level PPKM akan diturunkan. Tapi meski nanti turun namun kita harus terus mengajak masyarakat agar protokol kesehatan terus dijalankan," tandasnya, Selasa (31/8).

Dicontohkannya saat ini Indonesia sedang mulai mengakhiri gelombang kedua. Akan tetapi sejumlah negara justru tengah menghadapi gelombang ketiga. Dirinya pun berharap di Indonesia tidak terjadi gelombang keti-

ga. Oleh karena itu ketika sudah ada kelonggaran aktivitas serta level PPKM kelak diturunkan, namun jangan sampai seolah-olah bebas melakukan apapun. Hal ini karena virus Corona mudah menyebar kemana-mana. Sehingga upaya yang ampuh dalam mengantisipasi penularan ialah dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Di samping itu beberapa penyekatan jalan secara bertahap juga mulai dibuka. Selama penyekatan masyarakat lebih banyak menggunakan sepeda motor untuk menjalankan aktivitas penting. Namun ketika penyekatan dibuka, justru banyak terlihat kendaraan roda empat yang mendominasi. "Pada akhir pekan kemarin saya juga berputar memantau kondisi jalanan. Banyak mobil namun mayoritas plat AB. Kalau pun ada bus wisata, masih belum bisa parkir di tempur parkir resmi," imbuhnya.

Selain disiplin protokol kesehatan, potensi lonjakan wisatawan juga perlu

ada antisipasi. Salah satunya konsep One Gate System bagi armada bus pariwisata. Kota Yogya sudah menyiapkan satu pintu masuk melalui Terminal Giwangan guna pemeriksaan identitas kesehatan berupa surat negatif Covid-19 maupun kartu vaksin. Bus yang penumpangnya kepadatan tidak tertib aturan maka akan diputar balik serta tidak bisa melanjutkan ke destinasi wisata Kota Yogya. Pemberlakuan One Gate System diupayakan mulai pekan depan.

Meski demikian, kabupaten lain yang menjadi wilayah aglomerasi DIY diharapkan turut melakukan hal sama. Sehingga proses skrining bagi wisatawan yang masuk wilayah DIY bisa lebih optimal.

"Ketika Sleman maupun Bantul melakukan hal sama untuk bus pariwisata dari luar daerah, maka yang masuk Yogya akan tersaring. Saat ini pun petugas secara acak masih melakukan pemeriksaan kendaraan yang dari luar," urai Heroe. **(Dhi)-f**

DIY Kembali Raih Penghargaan Tepat Waktu TLHP

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai provinsi yang tepat waktu dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektoral Jenderal Kemendagri RI. Penghargaan diberikan kepada sepuluh daerah setingkat provinsi untuk pengawasan tahun 2019.

Kesepuluh provinsi penerima penghargaan ini ialah DIY, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Tengah, Bali, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Banten.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X secara daring menerima penghargaan tersebut dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Selasa (31/8). Penghargaan diberikan dalam acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2021.

Ditemui se usai penyerahan penghargaan, Sekretaris Daerah (Sekda)

DIY K Baskara Aji mengatakan, penghargaan itu adalah yang kedua kalinya. Karena sebelumnya pernah menerima penghargaan tersebut. DIY dinilai menjadi salah satu daerah yang bisa menindaklanjuti temuan-temuan Inspektoral Jenderal Kemendagri RI secara tepat waktu dan tepat mutu. Adapun terkait launching MCP, digagas bersama oleh Kemendagri RI, BPKP RI dan KPK RI. MCP merupakan gagasan KPK RI untuk bisa mempermudah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi.

"Saya kira MCP ini makin mempermudah pelaporan kita, sehingga kita tidak perlu lagi sering-sering tatap muka. Kita bisa mengisi format-format yang ada di sistem itu, yang kemudian akan ada analisisnya juga, sehingga kita bisa langsung tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk pengambilan keputusan," terang Baskara Aji.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito

Karnavian, mengucapkan selamat atas nama pemerintah dalam hal ini Kemendagri RI kepada sepuluh daerah yang telah menyelesaikan tindak lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu.

"Saya berharap ke depannya sepuluh daerah yang sudah berhasil ini bisa konsisten tepat waktu dalam menindaklanjuti Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta dapat jadi contoh serta motivasi bagi daerah lain," imbuhnya.

Sementara Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyatakan, KPK diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara. Mulai dari pencegahan, melakukan koordinasi dengan instansi yang juga melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik, sekaligus melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan daerah, hingga penyelidikan, penyidikan serta penuntutan kasus korupsi. **(Ria)-f**

Desa Wisata Perlu Kolaborasi untuk Bangkit

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa bagi seluruh desa wisata wilayah DIY. Dibanding 2019, saat ini hanya 10 persen saja wisatawan yang berkunjung ke desa wisata saat dibuka. Sementara saat ini dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semua desa wisata tutup total.

"Kita berharap pelonggaran PPKM agar bisa segera meningkatkan pariwisata dengan potensi dan inovasi yang ada," jelas Ketua Paguyuban BUMDES Indonesia dari Desa Wisata Pindul Sariyanta saat Zoominar dalam Forum Diskusi Ketangguhan Ekonomi Lokal yang digelar Badan Kesbangpol DIY bekerjasama dengan NarasiDesa.com, belum lama ini.

Membawa tema 'Adaptasi

Tourisme Connect untuk Percepatan Pemulihan Desa Wisata dan Desa Wirausaha", Yanta menyebutkan aktivitas desa wisata yang lumpuh berdampak dengan kegiatan ekonomi turunan/pendukung dan kelembagaan pengelola juga lumpuh. "Perlu strategi pemulihan desa wisata dengan menata kembali kelembagaan, inovasi daya tarik wisata, memaksimalkan UMKM, 1700 UMKM sudah siap dengan kondisi baru, serta implementasi CHSE (Cleanliness (kebersihan), Health (kehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (ramah lingkungan)," tegas Yanta.

Zoominar juga menampilkan pemantik materi Muchlis Ali dari Local Economic Development - Lead KOMPAK-Bappenas dengan Moderator

Cahyadi Joko Sukmono (Pemimpin Umum NarasiDesa.com). Zoominar dibuka Kepala Badan Kesbangpol DIY Dowo Isnuboro Imam Santoso SH yang menegaskan perlunya bangkit dan berkolaborasi di masa pandemi.

"Kegiatan-kegiatan desa wisata terus kita pantau. Bagaimana lembaga-lembaga ekonomi lokal di desa (BUMDesa, Koperasi, Pokdarwis, KUPM, dll) menemukan titik temu kolaborasi untuk ketangguhan ekonomi lokal karena dampak pandemi," tegasnya.

Sehingga Adaptasi TouriSME Connect perlu segera diwujudkan mengingat potensi ekonomi pariwisata, pendidikan di DIY menyumbangkan 64 persen pendapatan, jelas Cahyadi menambahkan saat pengantar diskusi. **(Vin)-f**

GERAKAN BERSAMA PERCEPAT CAPAIAN VAKSINASI

Yogya Berhasil Suntikkan 447.333 Dosis Vaksin

YOGYA (KR) - Kota Yogya telah menyuntikkan vaksin Covid-19 hingga 447.333 dosis untuk injeksi pertama. Capaian tersebut sebenarnya sudah mencapai 150 persen jika dibandingkan dengan penduduk Kota Yogya usia 12 tahun ke atas yang masuk sasaran vaksin. Akan tetapi, mayoritas yang divaksin ialah warga luar Yogya yang berdomisili maupun aktivitas hariannya di Kota Yogya.

"Kalau penduduk Kota Yogya yang masuk sasaran vaksinasi itu kan mencapai sekitar 311.000 jiwa. Tapi setelah kita sisir dari 447.333 dosis yang berhasil disuntikkan, baru 48,9 persen yang merupakan penduduk dengan identitas Kota Yogya," urai Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, di sela meninjau vaksinasi di Pondok Pesantren Harun Asy Syafii, Selasa (31/8).

Sehingga 51,1 persen dosis yang disuntikkan tersebut diterima oleh penduduk dengan identitas luar kota. Di antaranya ialah 25,6 persen ber KTP Sleman, 17,9 persen KTP Bantul, 2,9 persen KTP Kulonprogo, 3,3 persen KTP Gunungkidul dan 1,4 persen KTP luar DIY. Warga dari luar kota tersebut selama ini memiliki aktivitas di Kota Yogya sehingga masuk dalam sasaran vaksinasi yang dilakukan oleh Kota Yogya.

Kendati demikian, imbu Heroe, pihaknya saat ini tetap fokus untuk mengencarkan vaksinasi bagi penduduk Kota Yogya. Pasalnya terdapat sekitar 55 persen yang masih belum tervaksin.

"Strategi epidemiologi kan siapapun yang aktivitasnya di kota maka kita vaksin. Seperti yang saat ini kan banyak santri berasal dari berbagai daerah tapi juga harus kita vaksin termasuk pada kiai dan ustadznya," imbuhnya.

Heroe menyebut, gerakan bersama yang dilakukan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat mampu mempercepat capaian vaksinasi. Selain melakukan vaksinasi reguler di 18 puskesmas, 13 rumah sakit dan dua klinik maupun sentra vaksin, saat ini banyak kelompok masyarakat yang menyelenggarakan vaksinasi. Mereka biasanya menyiapkan tempat dan tenaga medisnya sedangkan pemerintah mendukung dosis vaksin.

Sementara dari aspek usia, penduduk yang telah divaksin paling tinggi berada di rentang usia 18-49 tahun hingga mencapai 85.473 orang. Sedangkan usia 12-17 tahun ada 17.605 telah divaksin, usia 50-59 tahun ada 28.172 orang dan usia 60 tahun ke atas mencapai 31.740 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Yogya Lana Unwanah, menambahkan pihaknya dalam waktu dekat juga akan mengoperasikan mobil vaksin. Salah satunya akan ditempatkan di pintu masuk Balai Kota Yogya. Hal ini karena balaikota sudah dicanangkan sebagai kawasan wajib masker dan wajib vaksin. Sehingga warga yang memiliki kepentingan di balaikota dan belum divaksin, bukan dilarang masuk melainkan akan divaksin terlebih dahulu. **(Dhi)-f**

REST IN PEACE
"Akulah kebangkitan dan hidup, barangsiapa percaya kepadaKU, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." (Yoh 11:25)

Telah pulang ke rumah Bapa di Surga
hari Selasa, 31 Agustus 2021 pk. 08.00 WIB di rumah.
Suami, Papa, Papa Mertua, Engkong, Saudara kami tercinta :

Yundi Kristianto
(Chen Tjin Yung)
Usia 73 Tahun
Taman Griya Indah IV/242 Yogyakarta

Jenazah disemayamkan di Rumah Duka PUKJ Ruang D, Jl. Sonopakis Lor Yogyakarta.
Akan dikuburkan di pemakaman Gunung Sempu Bantul hari Kamis, 2 September 2021.
Berangkat pk. 09.00 WIB. Upacara Gerejani diadakan pk. 08.00 WIB.

Kami yang mengasihi :
Istri : Rita Kustanti

Anak : Katarina Lisnawati Raharjo Budi Santoso Bernardi Surya Thomas Emerald Kristianto Sonata Angkasa Kristianto Harmoni Agung Kristianto	Menantu : Timotius Marfendi Agung Siwi Hastuti Yuliani Hany Harlyana
---	---

Cucu :
Nicholas Pasla Agung Surya, Alvin Pratama Putra, Julyana Dika Santoso,
Alvera Aditya Agustini, Karenina Talita Santoso, Vanessa Calista Pasla, Wilson Andrean,
Jansen Christian, Jamie Christian.

Beserta segenap keluarga dan family

TURUT BERDUKA CITA - P.U.K.J (0274) 377071,385622